

# Potret Pendidikan di Kampung Wambena dan Simporo Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

## I. Pendahuluan

### Garis Umum Persoalan Pendidikan di Papua

Pendidikan merupakan salah satu masalah utama di Provinsi Papua. Dari 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Papua merupakan provinsi pertama dengan angka buta huruf tertinggi, yaitu 22,03%.<sup>1</sup> Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kedua dengan angka buta huruf tertinggi dibawah Papua, yaitu 7,52% pertahun 2020. Sejak awal tahun diberlakukannya Undang-undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua, SKPKC Fransiskan Papua telah mencatat banyak persoalan pendidikan di Papua, seperti tenaga guru yang kurang, guru yang tidak disiplin, pemberantasan buta aksara, biaya pendidikan yang mahal, meningkatnya siswa yang tidak lulus, korupsi dana pendidikan bahkan lebih jauh masuknya militer kedalam lingkungan sekolah untuk mengajar telah menjadi rentetan persoalan pendidikan yang sampai hari ini pun masih ditemui di Provinsi Papua.

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua telah menyampaikan pada Komisi X DPR RI di tahun 2021 bahwa Papua memiliki banyak masalah pendidikan, seperti kendala kesejahteraan dan jaminan kehidupan bagi guru, minimnya sarana prasarana dan konflik sosial yang berdampak pada siswa. Inilah yang harus dirasakan oleh 4.000 (empat ribu) siswa di Kabupaten Nduga yang harus berhenti bersekolah selama 2 tahun 8 bulan karena konflik antara TPNPB dan TNI/Polri yang berdampak pada pengungsian masyarakat di Kabupaten Nduga. Selain itu pemberian kuota gratis dari Kemendikbud bagi siswa di Papua ini tidak bermanfaat karena 64% wilayah Papua tidak memiliki akses internet.

Provinsi Papua sendiri memiliki 28 Kabupaten dan 1 Kota dengan total luas wilayah Provinsi 312.224 km<sup>2</sup>. Daerah seluas ini memiliki 32.869 guru, yang terbagi dari 16.756 Guru SD, 8.757 Guru SMP, 4.589 Guru SMA, dan 2.767 Guru SMK di Papua dengan total sekolah 3.764 sekolah, yang terdiri dari 2.629 SD, 783 SMP, 253 SMA, dan 144 SMK, menurut data Dapodik. Namun nyatanya jumlah ini belum mampu memberantas angka buta aksara di Papua dikarenakan penyebaran guru yang masih lebih banyak di wilayah perkotaan. Provinsi Papua juga memiliki 42 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang tersebar di 9 Wilayah di Provinsi Papua, yaitu di Merauke, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mimika, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Jumlah Perguruan Tinggi terbanyak memang berada di Kota Jayapura, yaitu 14 Perguruan Tinggi.<sup>2</sup> Biasanya anak-anak dari berbagai daerah menyebut Kota Jayapura sebagai kota study karena mereka akan merantau ke Jayapura dan tinggal di asrama dan di kos-kos di Kota Jayapura. Jadi selain biaya kuliah yang harus dipenuhi, biaya kos juga sangat menjadi kebutuhan utama bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Jayapura.

<sup>1</sup> Lihat <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbwXrGmk-6-provinsi-dengan-angka-buta-aksara-tertinggi-di-indonesia>

<sup>2</sup> Lihat <https://www.masahen.com/2022/03/daftar-perguruan-tinggi-di-papua.html?m=1>

Hak Mendapatkan Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat 1. Ini artinya pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya, yaitu pendidikan. Bagi Provinsi Papua hak mendapatkan pendidikan ini semakin istimewa dengan keberadaan Otonomi Khusus, yang dari empat tujuan utama Otsus, salah satunya adalah untuk pendidikan. Sejak UU Otsus disahkan pada 21 November 2001 dan diperpanjang kembali keberadaannya melalui Undang-undang No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, aturan ini memberikan legitimasi bagi orang Papua untuk mendapatkan pendidikan dengan biaya serendah-rendahnya dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Kota/Kabupaten untuk memeperhatikan penyelenggaraan pendidikan. Dalam Pasal 56 ayat (6) huruf a dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua dan juga pada huruf b yang mengatakan bahwa Pemerintah wajib menyediakan satuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pendidik dan tenaga pendidikan.

Semua aturan dalam rangka mempermudah akses pendidikan di Papua telah dilakukan hanya tinggal melihat bagaimana pemerintah mengimplemtasikan setiap aturan yang telah diturunkan dan melihat jalannya pendidikan disetiap daerah sebagai ukuran kemajuan pendidikan orang asli Papua.

Pada Maret – Mei 2022, Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP), melakukan riset pendidikan di Kampung Wambena, Distrik Depapre dan Kampung Simpuro (Homfolo), Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura. Pihak SKPKC Fransiskan Papua ingin melihat secara langsung bagaimana proses pendidikan dan keluhan terkait pendidikan yang dialami dan dirasakan penerima layanan, yakni masyarakat di dua kampung tersebut. Metode riset yang digunakan oleh SKPKC Fransiskan adalah pengamatan secara langsung, wawancara dan studi kepustakaan (mengumpulkan berita-berita dan laporan) terkait pendidikan di Kabupaten Jayapura. Harapan besar adalah, dengan temuan langsung di penerima manfaat ini dapat membantu para pemberi layanan baik di tingkat kampung maupun di Kabupaten Jayapura, untuk bersama mencari jalan keluar demi pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di Kabupaten Jayapura.

## Garis Umum Persoalan di Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura adalah salah satu Kabupaten Induk dari Kota Jayapura dan Kabupaten Sarmi yang memiliki luas wilayah 17.517 km<sup>2</sup>. Kabupaten Jayapura menjadi salah satu dari delapan kabupaten otonom lainnya yang terbentuk sejak Irian Barat (Papua) bergabung dengan Indonesia melalui PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 dan dengan disahkan UU No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat. Saat ini di Kabupaten Jayapura sendiri terdapat 19 Distrik, 5 Kelurahan dan 139 Kampung.

Untuk pendidikan sebenarnya bukan hal yang baru bagi orang-orang Papua, khususnya orang Jayapura. Sejak masuknya Belanda, telah banyak pendidikan formal yang dibuka di Kabupaten Jayapura. Namun tetap saja, pendidikan dan sekolah telah dikenal oleh penduduk Jayapura bahkan sebelum mereka mengenal negara, seperti yang pernah dimiliki oleh masyarakat adat di Sentani, yaitu Khombo Imea (sekolah untuk anak-anak laki-laki) tempat dimana anak laki-laki belajar tentang batas-batas wilayah, berburu, dan lain-lainnya. Khombo Imea ini telah dimusnakan sejak tahun 1920-an.

Saat telah bergabung dengan Indonesia, tepatnya dimasa-masa orde baru banyak masalah pendidikan yang dihadapi oleh orang-orang di Kabupaten Jayapura seperti kekurangan guru, tidak ada seragam, tidak ada alat tulis, tidak ada biaya bahkan tidak banyak sekolah. Bahkan persoalan-persoalan ini masih terjadi hingga hari ini. Ditahun 2020 lalu, Ted Mokay selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura mengatahkan bahwa persoalan klasik masih hantui pendidikan di Kabupaten Jayapura. Masalah klasik ini ternyata sama seperti masalah umum yang terjadi di Papua, yaitu kekurangan guru, tetapi juga fasilitas pendukung, infrastruktur pendidikan, serta sejumlah masalah lain yang dianggapnya kompleks.<sup>3</sup>

Padahal di tahun 2020 juga sekitar Rp.16 Miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk pembangunan ruang belajar, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Di dalam program prioritasna, Bupati Kabupaten Jayaapura, Matius Awaoitouw menaruh pendidikan dan kesehatan sebagai program utama, selain kampung adat. Bagi Bupati Matius, untuk pendidikan dan kesehatan tidak ada tawar-tawar lagi harus diutamakan untuk pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura. Tetapi dalam acara Peringatan Hari Buta Aksara Internasional tahun 2021 di Kabupaten Jayapura, disampaikan disana bahwa masih ada 4.038 masyarakat di Kabupaten Jayapura yang masih buta aksara.<sup>4</sup>

Sementara belum ada kepastian berapa jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura pada tahun 2020 karena terakhir terjadi selisih jumlah penduduk antara data BPS Kabupaten Jayapura dan Dukcapil Kabupaten Jayapura. Data BPS menyebut jumlah

---

<sup>3</sup> Lihat <https://jubi.co.id/masalah-klasik-masih-hantui-pendidikan-di-kabupaten-jayapura/amp/>

<sup>4</sup> Lihat <https://papua.inews.id/berita/peringatan-hari-aksara-internasional-4038-warga-di-kabupaten-jayapura-masih-buta-aksara>

penduduk tahun 2020 adalah 161.171.000 dan Dukcapil sendiri menyebut jumlah penduduk Kabupaten Jayapura adalah 171.554.000 jiwa.

Kabupaten Jayapura memiliki 217 sekolah, yang terdiri dari 135 SD, 45 SMP, 23 SMA dan 14 SMK. Selain itu, Kabupaten Jayapura juga memiliki 5 Perguruan Tinggi, 1 Perguruan Tinggi Negeri dan 4 Perguruan Tinggi Swasta. Salah satu kendala yang harus dihadapi untuk tetap bersekolah dengan baik adalah jumlah sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan untuk tingkatan atas atau kejuruan hanya ada diwilayah Distrik Sentani Kota sebagai Pusat Ibu Kota, seperti SMA N 1 Sentani, SMA Asisi, SMK YPKP Sentani, SMK N 1 Sentani dan diwilayah Distrik Waibu, yaitu SMA Advent Doyo Baru dan SMK 5 di Distrik Waibu. Sementara biaya sekolah mahal dan akses transportasi jauh bagi mereka yang tinggal dipinggiran danau atau bagi mereka yang datang dari kampung jauh seperti Kampung Dosay, Kampung Maribu atau disebelah timur dari Kampung Netar dan Kampung Harapan. Peningkatan kualitas sekolah sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar ada keadilan bagi sekolah-sekolah yang berada dipelosok-pelosok, yang jaraknya jauh dari Distrik Sentani Kota, seperti Distrik Depapre.

Begitu juga dengan perguruan tinggi, sekalipun Kabupaten Jayapura memiliki 5 perguruan tinggi, tetapi Universitas Cenderawasi, Politeknik Kesehatan (Poltekes) dan perguruan tinggi lain di Kota Jayapura masih menjadi pilihan anak-anak di Kabupaten Jayapura untuk melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi.

### **Gambaran Umum Kampung Homfolo**

Kampung Adat Homfolo/Simporo adalah salah satu kampung di Kabupaten Jayapura. Kampung Homfolo masuk dalam Distrik Ebungfauw, distrik yang berada di Danau Sentani. Pusat Pemerintahan Distrik Ebungfauw berada di Kampung Kameyakha. Selain itu di Kampung Kameyakha juga dibangun SMP 1 Atap yang aktifitas belajar mengajarnya dimulai sejak tahun 2018. Di Distrik Ebungfauw terdapat 5 kampung, Kampung Adat Homfolo/Simporo merupakan satu-satunya kampung adat di Distrik Ebungfauw dan salah satu dari 14 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

Kampung Adat Homfolo berbatasan dengan Kampung Kameyakha di sebelah kanan dan Kampung Babrongko di sebelah barat. Jalan Raya yang menghubungkan Kabupaten Keerom, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura telah mempermudah akses darat bagi setiap warga antar kampung. Ini juga yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Homfolo. Mereka hanya perlu berjalan kaki sekitar 45 menit untuk sampai di Kampung Kameyakha. Beberapa kali kami melalui jalan ini, nampak anak-anak sekolah dari SMP 1 Atap yang saling berboncengan menggunakan motor melalui jalan ini untuk kembali pulang ke Kampung Homfolo dan Kampung Babo.

Kampung Adat Homfolo memiliki 522 Penduduk, dimana terbagi menjadi 130 Kepala Keluarga dengan 274 Jumlah Penduduk Laki-laki dan 248 Jumlah Penduduk

Perempuan. Mayoritas penduduk Kampung Homfolo adalah orang Papua, yang berasal dari Suku Sentani bagian tengah. Mereka mendiami bagian selatan dari Danau Sentani. Marga asli dari Kampung Homfolo adalah Tokoro. Aktifitas pemerintahan di Kantor Kampung tidak berjalan. Beberapa kali kami mengunjungi kampung Homfolo, kantor kampung selalu tertutup, Hanya ketika kami mewawancarai Sekertaris Kampung, kami bisa mendapat kesempatan untuk melihat isi kantor kampung yang juga kosong. Saat mencari Kepala Kampung pun kami selalu diarahkan untuk bertemu langsung dengan Ondofolo (Pimpinan Adat) karena Kepala Kampung tinggal di Kampung Yoboy.

Kepala Kampung Homfolo adalah Bapak Demas Tokoro, ia ditunjuk menjadi Kepala Kampung oleh Alm Ondofolo Homfolo sebelumnya yang merupakan saudaranya. Saat ini, Kampung Homfolo dipimpin oleh Ondofolo Anderson Tokoro yang menggantikan ayahnya. Kampung Homfolo, Kampung Babo dan Kampung Yoboy memang memiliki hubungan kekerabatan. Ini juga terlihat dari nama SD di Kampung Homfolo, yaitu SD Negeri YOSIBA (Yoboy, Simpuro, Babrongko).

Secara administrasi Kampung Yoboy masuk dalam Distrik Sentani. Selain terpisah secara administratif, Kampung Homfolo dan Kampung Babo juga terpisah secara geografis dengan Kampung Yoboy, makanya itu untuk sampai ke Kampung Yoboy, mereka harus naik jonson. Biaya dari Kampung Homfolo menuju Kampung Yoboy adalah Rp.10.000 dengan menghabiskan waktu sekitar 10 menit untuk sampai di



Foto 1 Kampung Simpuro  
Foto Satelit Google Earth

Kampung Yoboy. Kampung Yoboy telah memiliki sekolah sendiri, oleh sebab itu hanya dua kampung, yaitu Homfolo dan Babrongko yang masih belajar dalam satu sekolah. Tak jarang masyarakat menyebut sekolah ini sebagai SD N SIBA (Simpuro Babrongko). Jadi Kampung Homfolo memiliki 1

bangunan sekolah dasar dan 2 bangunan PAUD, yaitu PAUD Sinar

Kasih yang berada didekat Kantor Kampung dan PAUD Sejahtera yang berada dilokasi yang disebut masyarakat sebagai Bhubay.

Mayoritas penduduk kampung bekerja sebagai petani dan nelayan. Biasanya dari pagi mereka yang telah pergi membuang jaring atau mengecek jaring, ada juga yang telah menjual hasil tangkapan ikan ke Pasar Phara Sentani dan Pasar Lama Sentani. Pintu-pintu rumah masyarakat yang kami temui lebih banyak tertutup, biasanya anak-anak saja yang akan bermain di Obhe (Para-para Adat) yang berhadapan dengan kantor kampung atau tidak mereka berenang didermaga. Mereka bermain pada siang dan sore hari. Hanya sedikit masyarakat kampung yang membuka kios-kios kecil, jumlah mereka tidak sampai sepuluh. Memang lebih banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan karena tempat tinggal mereka didanau. Sementara orangtua bekerja, anak-anak biasanya akan pergi ke sekolah dan bermain.

Di SD N Yosiba ada 10 guru yang terdiri dari tiga ASN, empat tenaga honor dan tiga tenaga kontrak. Dari 10 guru yang ada, 7 guru telah sarjana dan 3 guru lulusan SMA. Sedangkan jumlah siswanya ada 158 siswa dari dua kampung, yaitu Homfolo dan Babrongko. Tidak adanya data jumlah penduduk kampung berdasarkan klasifikasi usia membuat kami tidak bisa mengetahui berapa jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan di SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi.

### **Gambaran Umum Kampung Wambena**

Kampung Wambena adalah kampung kedua yang kami kunjungi. Kampung ini berada di Teluk Tanah Merah, Kabupaten Jayapura. Kampung Wambena masuk dalam Distrik Depapre. Selain Wambena, ada beberapa kampung lainnya juga, seperti Kampung Yepase yang berada disebelah dikiri kampung Wambena dan kampung Dormena yang berada di sebelah kanan kampung Wambena, dan masih ada juga beberapa kampung lainnya. Tidak batas administratif yang menunjukkan luas kampung Wambena. Menurut penjelasan salah satu pegawai di Distrik Depapre, mereka masih belum mengetahui berapa luas kampung Wambena karena banyak permasalahan yang berkaitan dengan hak ulayat, yang kemudian menghambat mereka untuk mengukur luas wilayah dan batas kampung. Sementara itu Pusat Pemerintahan Kampung berada di Depapre, selain Kantor Distrik, ada juga Puskesmas Depapre, Polsek Depapre, Koramil, Pasar dan terminal. Di Depapre juga terdapat SMP N 1 Depapre dan 1 bangunan sekolah dasar.

Untuk sampai dari Distrik Sentani Kota menuju Kampung Wambena, kami menghabiskan waktu lebih dari 1 jam. Ditambah dengan kondisi Jalan Sentani-Depapre yang rusak membuat banyak waktu kami habiskan diperjalanan. Jalan yang rusak ini kami lewati sampai tiba di Kampung Wambena. Disini masih alamnya masih sangat asri, berbeda dengan kondisi lingkungan di wilayah Sentani.

Wambena merupakan kampung dengan mayoritas penduduk orang Tanah Merah. Marga dari kampung ini adalah Yarisitouw, Demetouw, dan Yarona. Kami belum sempat bertemu dengan tokoh adat di kampung ini, kami lebih banyak bertemu dengan aparat pemerintah kampung, petugas kesehatan dan guru-guru dikampung ini. Disini ada lebih dari 347 Jiwa dengan 82 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 183 laki-laki dan 164 perempuan, sedangkan jumlah anak berdasarkan klasifikasi usia tidak ada dikampung ini. Hampir sama seperti Kampung Simporo, kami tidak tahu jumlah anak usia SD, SMP, SMA/SMK bahkan yang diperguruan tinggi.

Kampung ini memiliki satu bangunan sekolah dasar, satu bangunan PAUD yang tergabung dengan Kantor PKK dan Posyandu. Dan ada satu Polindes di Wambena, tetapi tidak lagi digunakan. Mayoritas penduduk beragama Kristen dan sekolah di Kampung ini juga adalah SD YPK Wambena. Disekolah ini ada tujuh guru yang mengajar, tiga ASN, dua kontrak dan dua honor. Jumlah siswa disini ada 75 siswa. SD YPK Wambena memiliki enam kelas dengan satu ruangan multifungsi, yaitu

sebagai perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ada salah satu guru yang tinggal diruangan ini.

Sebenarnya di Kampung Wambena ada dua rumah guru dan satu rumah kepala sekolah, namun hanya satu guru yang menempati rumah guru, selain itu Kepala Sekolah SD YPK Wambena sendiri tidak tinggal menetap di kampung. Kepala Sekolah adalah anak asli dari kampung, sayangnya kami belum bertemu dengannya karena ia tinggal di Kampung Dosay dan saat kami mengunjungi kampung, kami hanya bertemu dengan dua ibu guru yang tinggal di kampung. Mereka berdua adalah Ibu Icha dan Ibu Elisabeth, mereka sama-sama berasal dari luar Papua. Ibu Elisabeth yang menempati rumah guru dan Ibu Icha yang menempati ruang multifungsi disekolah.

Mayoritas masyarakat di Kampung Wambena adalah Petani. Pada hari-hari pasar, mereka akan pergi ke Pasar Depapre dan Pasar Phara Sentani untuk berjualan. Uang yang didapat diputar kembali untuk kebutuhan rumah dan kebutuhan sekolah anak. Disini orangtua sangat memperhatikan pendidikan dan turut mengawal setiap

permasalahan pendidikan yang ada dikampung. Kehidupan masyarakat juga selain rukun, mereka juga selalu ramah pada setiap orang yang berkunjung di Kampung Wambena. Alam yang indah dan masih asri juga menunjukkan bagaimana masyarakat terus menjaga lingkungannya.



Foto 2 Kampung Wambena  
Foto Satelit Google Earth

## Masalah Pendidikan di Kampung Homfolo/Simporo

Kampung Simporo memiliki beragam masalah pendidikan. Dalam sebuah kesempatan berdiskusi bersama Ondofolo Kampung Homfolo dikatakan bahwa *“kualitas anak sekarang dengan orangtua dulu sangat berbeda, sekalipun orangtua dulu pendidikannya hanya sampai SD, tetapi mereka pintar-pintar”*. Orangtua dulu yang dimaksud sang pimpinan adat ini adalah orangtua yang menempuh pendidikan di zaman Belanda dan diajarkan oleh guru-guru penginjil yang berasal dari sanger dan ambon. Pendidikan telah masuk di Kampung Simporo sejak tahun 1910, namun hal ini baru diketahui juga oleh masyarakat ketika ada mantan guru asal Biak yang menyampaikannya. Tidak ada yang tau pasti kapan sejarah pendidikan masuk di Kampung Simporo. Menurut salah satu cerita, dikatakan bahwa sekolah sebelumnya berada di Kampung Babrongko dan baru pindah ke kampung Simporo ditahun 1974 atau 1976. Berawal dari sekolah YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) hingga berubah menjadi SD Inpres karena dimasa orde baru SD Inpres atau sering disebut “sekolah kecil” adalah sarana yang disediakan bagi anak-anak didaerah terpencil dan kawasan perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

Namun yang disayangkan oleh Ondofolo Homfolo, IQ anak-anak sekarang tidak sama seperti orangtua dulu, padahal anak-anak dulu hanya belajar diatas batu bukan, seperti saat ini yang belajar menggunakan buku, pensil, penghapus dan pulpen. Dan ternyata ada beragam masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kampung Homfolo untuk memajukan pendidikan di Kampung Simporo.

### 1. Transportasi

Penting untuk diketahui bahwa kehidupan masyarakat di Kampung Homfolo saat itu sangat susah. Banyak orang tua yang putus sekolah di tingkat SMP karena tidak memiliki biaya, ditambah dengan lokasi seperti SMP dan SMA yang ada di Sentani. Kehidupan mereka dulunya sangat susah karena tidak memiliki motor jonsen (speed boat) seperti hari ini. Dulu orangtua biasanya harus mendayung sampai ke dermaga Yahim untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah, dan jika musim angin datang, mereka dengan terpaksa tidak bisa pergi ke area perkotaan. Kondisi ini terjadi terus menerus hingga membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan. Bagi orangtua yang mampu dan memiliki kerabat di daerah perkotaan, mereka akan menitipkan anaknya untuk tinggal di Kota, sampai saat ini hal ini masih terjadi. Orangtua akan menitipkan anaknya untuk tinggal di rumah saudaranya di kota.

Masyarakat kampung yang bisa mengenyam pendidikan sampai di tingkatan SMA dan perguruan tinggi masih bisa bekerja sebagai pegawai negeri, sedangkan bagi orangtua yang putus sekolah di tingkatan SMP, mereka lebih banyak bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang dan ada juga pengrajin. Oleh sebab itu mereka sangat berjuang agar anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Sekalipun mereka harus berjuang lebih keras untuk mencari uang lebih banyak karena untuk biaya transportasi dan biaya pendidikan anak ke kota mulai dari speed boat, uang ojek. Jika anak mereka bersekolah di



Foto 3. Siswa SMP di Kampung Simporo yang pulang sekolah dari Distrik Sentani Kota Dok. SKPKC Fransiskan Papua

SMP YPPGI atau SMA YPPGI di Kelurahan Dobonsolo, Yahim, orangtua hanya akan memikirkan uang ojeknya saja, akan tetapi ada masalah lain yang harus ditemui lagi, yaitu kualitas sekolah yang bahkan sering dianggap sebagai sekolah buangan. Ini membuat banyak anak yang memilih sekolah di pusat kota Kabupaten Jayapura. Hal ini berdampak pada penambahan biaya taxi. Kurang lebih biaya yang dikeluarkan untuk transportasi bisa mencapai Rp.50.000 untuk pulang pergi dari kampung ke sekolah.

*“Transportasi sudah bagus, hanya kendalanya di biaya.”<sup>5</sup>*

Karena biaya yang mahal bagi warga biasa, sehingga tak jarang anak-anaknya harus dititipkan bersa

ma saudara di Kota Sentani. Selain biaya transportasi, kendala lainnya adalah speed boat. Speed boat yang mengantar anak-anak ke sekolah dan guru SD dari Kota Sentani yang mengajar di Simporo sering terlambat. Karena speed boat ini adalah milik masyarakat. Tidak ada speed boat khusus yang menjadi transportasi bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.

*“Kendala biasa di kendaraan (Jhonson) saja. kendaraan kan milik orang, bukan sekolah punya. Karena masyarakat punya jadi, kadang dong ke sekolah itu terlambat. Kesulitannya hanya kendaraan untuk dong menyebarang dari sini ke sebelah untuk pergi ke sekolah. Ada anak-anak yang banyak sekolah di kota (SMA, SMP), dorang kesulitan disitu. Kadang dorang pergi ke sekolah itu dong terlambat. Terlambat karena Jhonson. Selain itu, keuangan juga. Biaya juga menjadi kendala. Tapi terima kasih, berkat Tuhan selalu ada”<sup>6</sup>*

## 2. Bantuan Pendidikan dari Kampung yang tidak merata.

Beasiswa menjadi satu kebijakan bantuan pendidikan yang sangat dinanti, begitu juga dengan pemberian beasiswa bagi anak-anak sekolah di Kampung Simporo. Di Kampung Simporo setiap jenjang pendidikan menerima bantuan pendidikan dari sekolah berupa uang maupun seragam. Untuk uang setiap jenjang memiliki perbedaan satu sama lain, untuk SD akan diberikan uang sebesar Rp. 250.000, SMP Rp. 500.000, SMA Rp. 750.000 dan Perguruan tinggi sebesar Rp.1.000.000. Walaupun demikian ada informasi yang berbeda datang dari warga kampung Homfolo yang lainnya, yaitu anak-anak SD tidak menerima bantuan pendidikan dari kampung. Menurut seorang ibu rumah tangga yang aktif bekerja dalam PKK dan PAUD di Kampung Homfolo, tidak ada bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kampung pada anak-anak SD, yang

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Noak Tokoro pada 19 Maret 2022

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Mama LY, pada 16 Maret 2022

diberikan hanya seragam sekolah. Ini juga dikatakan beberapa orangtua lainnya. Alasan anak-anak SD tidak menerima bantuan pendidikan berupa uang karena lokasi sekolah yang berada didalam kampung.

Cerita yang berbeda justru datang dari orangtua lainnya, seorang bapak yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh bangunan. Ia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak pernah menerima bantuan pendidikan dari kampung. Baginya perhatian pemerintah sangat kurang sekali terhadap pendidikan. Memang di sini terdapat perbedaan dari setiap orangtua terkait bantuan pendidikan dari kampung. Ada orangtua yang mengatakan anaknya dapat dari SD sampai di perguruan tinggi, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa anak-anaknya hanya dapat dari tingkatan SMP sampai perguruan tinggi dan bahkan ada yang tidak mendapat bantuan sama sekali. Di sini juga ada warga yang memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar), tetapi mereka juga belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

*“Tidak ada. pernah dapat dari pemerintah kampung, tapi itu sudah tiga tahun lalu, dapat beasiswa. Hanya satu kali itu saja. Sampai sekarang tidak ada, khusus untuk kampung simporo tidak ada. bagi anak-anak sekolah belum ada beasiswa. Waktu itu, sesuai dengan tingkatan, mereka ambil dari kuliah, SMA, SMP dan SD. Yang kuliah itu 1 juta, yang SMA 700, SMP 500, terus yang SD 300 ribu”<sup>7</sup>*

Pernyataan yang berbeda juga datang dari aparat kampung yang mengatakan bahwa bantuan pendidikan bagi masyarakat diberikan oleh aparat kampung. Dan untuk SD diberikan bantuan sebesar Rp. 700.000, SMP sebesar Rp. 800.000 dan Perguruan tinggi sebesar Rp.1.000.000, namun ia juga mengakui bahwa untuk SD sudah tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan seragam. Ini dikarenakan pemerintah Kampung melihat bahwa bantuan pendidikan tidak dipergunakan semestinya oleh orangtua dan mereka juga melihat anak-anak bersekolah dengan seragam yang kurang bagus, akhirnya mereka membuat kebijakan untuk membeli seragam sekolah untuk anak-anak SD dari baju, topi, dasi dan semuanya dibelanjakan bersama orangtua di Kota. Jadi sekitar Rp. 470.000 untuk yang digunakan untuk belanja kebutuhan satu anak dan sisanya Rp. 230.000 diserahkan kembali pada orangtua.

Bagi anak-anak asli kampung yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mereka bisa mendapat bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten. Bantuan biaya pendidikan ini biasanya diberikan bagi mahasiswa semester akhir untuk anak-anak di Kabupaten Jayapura dan bantuan ini juga diterima oleh anak-anak di Kampung Homfola. Namun kami belum sempat bertemu dengan anak-anak di kampung yang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah Kabupaten Jayapura.

### **3. Sarana Prasarana**

Kampung Homfola memiliki dua gedung PAUD, yaitu PAUD Sinar Kasih dan PAUD Sejahtera, namun dinamika PAUD untuk hadir dan bertahan di Kampung

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ET, pada 25 April 2022

Simporo juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah. PAUD yang pertama kali masuk di Kampung adalah PAUD Sinar Kasih. Sejak tahun 2006 PAUD ini ada, namun sebelumnya ia adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Menurut seorang guru SD Yosiba, yang pernah mengajar di PAUD Sinar Kasih, PAUD ini berdiri dari tahun 2006. Saat itu PKBM dibawah untuk masuk ke lima kampung di Distrik Ebungfauw, namun hanya Kampung Simporo yang menerima.

Memperjuangkan pendidikan di tingkat dasar ini ternyata tidak mudah di tahun awal pendiriannya, ada masyarakat yang menolak dan meragukan kualitas pendidikan yang diajarkan karena tenaga pengajar yang dilihat hanya ibu-ibu rumah tangga. Hal ini juga dirasakan oleh Ibu Milka Apaseray yang terlebih dulu bergabung di PAUD Sinar Kasih sebelum akhirnya mendapat bantuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi hingga akhirnya menjadi Guru Kontrak di SD Yosiba.

Di kampung ini tidak ada TK (Taman Kanak-kanak), jadi biasanya setelah dari PAUD, anak-anak akan langsung masuk di Sekolah Dasar. Hal ini menjadi alasan kehadiran PAUD di Kampung sangat penting karena Ibu Milka sendiri mengungkapkan bahwa usia-usia tiga tahun keatas merupakan usia-usia emas bagi sang anak untuk tumbuh dan belajar.

*“Mengajar sudah ajar, tetapi kita juga harus didik dong punya karakter, bagaimana cara dong bisa mengerti duduk yang baik, bagaimana cara dia bisa kenal dia punya diri. Sangat sulit, sampai kitong bisa pakai celana duduk dari bawah merayap. Ketong juga atur kitong punya nada bicara supaya bagaimana anak itu dia senang. Setengah mati, jadi memang kalau mau lihat orang tua yang sekolah, dong mengerti dengan pendidikan. Orang tua yang tidak pernah sekolah, dong tidak mengerti dengan pendidikan, dong anggap macam PAUD itu tidak ada arti. ‘Apa yang kamu ajar, kitong juga bisa ajar di rumah’, Kata beberapa orangtua seperti itu”*

Keraguan yang datang nyatanya tidak mematahkan semangat untuk mengajar. 10 tahun PAUD hadir di Kampung Simporo, akhirnya di tahun 2016 pembangunan gedung PAUD Sinar Kasih dilakukan, sedangkan untuk PAUD Sejahtera telah mendapat Surat Izin Operasional sejak tanggal 9 Februari 2015.



Foto 4,5,6 Gedung Sekolah SD Impres Yosiba  
Dok. SKPKC Fransiskan Papua

Berbeda dengan PAUD, SD N Inpres Yosiba sendiri telah ada sejak tahun 1 Januari 1910 di Kampung Homfola, namun sebelumnya mereka tidak belajar di dalam ruangan, melainkan di dalam gereja, hingga akhirnya tempat belajar dipindahkan ke lokasi sekolah hari ini yang berada di perbukitan kampung. SD Inpres Yosiba memiliki enam kelas, satu ruang guru dan satu perpustakaan. Sayangnya, sekolah lama yang telah berdiri membantu proses pendidikan masyarakat di dua kampung ini justru tidak dijaga dengan baik oleh masyarakat, khususnya mereka yang mabuk dan merusak fasilitas sekolah, seperti jendela dan pintu. Di sekolah ini, hampir seluruh jendela sekolah di setiap ruangan kelas ada saja yang pecah. Toilet sekolah juga tidak terjaga dengan baik.

Kondisi sekolah yang tidak aman membuat Kepala Sekolah SD Yosiba memutuskan untuk tidak menyimpan barang-barang berharga di sekolah, oleh sebab itu ruang guru di kampung terlihat sangat sederhana tanpa ada barang-barang elektronik yang dapat membantu guru-guru di sekolah saat mengajar. Untuk mengatasi masalah ini ada bantuan pembangunan pagar sekolah pada tahun 2021 dari Pemerintah Kampung Simpuro, namun bantuan pagar ini harus terhenti karena kendala anggaran dari dana kampung. Pagar yang dibuat masih merupakan pagar dari kawat besi, yang telah tersembunyi tingginya rerumputan di sekitar pagar.

Selain itu karena tuntutan Kurikulum K13 yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan, akhirnya membuat guru-guru di sekolah kesulitan untuk membuat raport sesuai standar kurikulum karena guru-guru diharuskan memiliki laptop untuk menginput data anak-anak dan membuat raport. Guru-guru di Kampung juga masih membutuhkan pelatihan untuk membantu mereka bekerja sesuai dengan standar kurikulum K13.

#### **4. Jumlah Guru yang Kurang dan Tidak Serius Mengajar**

Permasalahan guru memang menjadi masalah utama pendidikan di Papua. Hal yang sama juga dirasakan di Kampung Homfola, dimana guru-guru yang mengajar jumlahnya kurang. Jumlah siswa di Yosiba adalah 158 sedangkan jumlah guru sebanyak sepuluh (10), tujuh (7) diantaranya telah memiliki gelar sarjana sedangkan 3 guru merupakan lulusan SMU. Yang mengajar disini terdiri dari 4 tenaga PNS, 3 honor dan 3 tenaga kontrak.

SD Yosiba sendiri kekurangan guru mata pelajaran muatan lokal (Mulok), guru Pendidikan Jasmani (Penjas) dan guru Agama. Sebenarnya guru Penjas dan guru Agama telah ada, namun mereka tidak lagi aktif mengajar. Mereka sendiri merupakan tenaga honor di SD Yosiba. Akhirnya ada usulan untuk mengganti mereka karena selain mereka lulusan SMU, yang sedang menempuh pendidikan diperguruan tinggi, jika mereka selesai dan mendaftar jadi guru, mereka akan dipindah tugaskan oleh Dinas. Ini menjadi pertimbangan untuk mengganti dan menambah guru pada beberapa mata pelajaran Mulok, agama dan Penjas.

Banyak orangtua yang akhirnya ikut mengeluh terkait kekurangan guru di Kampung Homfolo. Seringkali dijumpai bahwa satu guru bisa mengajar beberapa rombongan belajar. Kalau sudah waktunya, ada rombongan belajar yang tidak mendapatkan pelajaran sampai mereka pulang ke rumahnya.

*“Saya punya cucu satu sekolah di SD sini, jadi saya bisa tahu sedikit tentang keadaan sekolah di sini. Kekurangannya guru. Kadang 1 guru bisa layani berapa kelas sekali. Ada murid yang tunggu sampe tidak mengajar, ada yang pulang sendiri. Ada yang tunggu sampe gurunya kasih tahu. jadi, kurang lancar begitu”<sup>8</sup>*

Selain warga, persoalan guru juga menjadi perhatian Pimpinan adat, yaitu Ondofolo Homfolo. Menurut Ondofolo Homfolo, selain jumlah guru yang kurang, persoalan lainnya adalah ketidakseriusan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah.



Foto 7 Anak Sekolah di SD Inpres Yosiba  
Dok. SKPKC Fransiskan Papua

*“Lebih buruk hari ini, karena gajinya sudah mulai membaik, tapi para pengajar atau guru itu tidak punya waktu untuk mengajar atau mendidik anak-anak sendiri. Adapun guru-guru dari kampung ini, tapi mereka pun tidak serius mengajarkan para siswa yang ada. Otomatis kalau sekarang ini, kepintaran dari orang-orang tua dulu hanya sebatas SD, Tapi mereka lebih pandai dari anak-anak SD sekarang. Walaupun batu sebagai bukannya, tapi mereka lebih pintar dimasa yang lalu”<sup>9</sup>*

Keluhan yang disampaikan oleh Indofolo ini disampaikan juga oleh salah satu murid SD Inpres Yosiba. Dari 10 guru, ada 6 guru yang mengajar. Ketika Tim SKPKC FP melakukan pemantauan hanya terdapat 4 guru yang mengajar dan beberapa ruangan kelas yang tidak ada gurunya karena tidak hadir.

Hampir semua guru yang mengajar di SD Yosiba menetap di Kampung Homfolo dan Babrongko, kecuali salah satu guru yang datang dari Kota Jayapura yakni Margaretha Bonai. Dia satu-satunya guru yang tinggal di Dok Sembilan, Kota Jayapura. Ia sangat dikenal warga kampung karena perjuangannya untuk selalu mengajar dari Kota ke kampung Homfolo.

Pada kesempatan riset, Tim SKPKC Fransiskan Papua bertemu dengan anak-anak dari SD Yosiba. Dalam sebuah ruangan kelas, seorang anak mencoba membaca tulisan yang kami. Ia telah memasuki kelas 3, namun untuk membaca, sang anak masih mengeja huruf perhuruf. Begitu juga anak kelas lima, mereka belum bisa membaca dengan lancar. Kondisi ini sangat memprihatikan karena

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan warga Kampung Simporo, Bapak NT & MT, pada 19 Maret 2022

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ondofolo Homfolo, pada 14 April 2022

mayoritas orangtua anak-anak ini adalah nelayan. Mereka membuang jaring dan harus pergi menjualnya lagi. Sementara pendidikan bagi anak-anak telah dititipkan pada guru di PAUD dan di SD. Namun, yang terjadi, guru-guru justru jarang mengajar. Inilah potret pendidikan dari Kampung Homfolo.

## 5. Honor Para Pengajar

Gaji guru honor dan kontrak di SD Yosiba berbeda. Biasanya guru honor dibayar menggunakan uang dari dana bos, sementara guru kontrak akan dibayar langsung oleh Kabupaten. Uang makan guru honor menjadi tanggungan dari dana bos. Biasanya setiap tiga bulan mereka juga akan menerima uang dari kabupaten sebesar Rp.500.000. Sedangkan guru honor tidak menerima uang dari dana bos, mereka hanya akan menerima gaji sebesar Rp.2.500.000 selama satu bulan dan biasanya akan dibayar perdua bulan, jadi untuk gaji dibulan januari dan february akan dibayar dibulan maret.

Permasalahan gaji pengajar menjadi hal yang penting. Ini juga diungkapkan oleh guru-guru di PAUD. Menurut Ibu Yeti sejak bulan Januari dan Februari 2022, ia menutup PAUD karena tidak memiliki uang untuk memberikan gaji bagi para guru, yang mayoritas adalah Ibu Rumah tangga. PAUD Sinar Kasih sendiri diajar oleh 5 guru. PAUD biasanya menerima bantuan dari dana kampung sebesar Rp.25.000.000 dan dibagi untuk PAUD Sejahtera dan PAUD Sinar Kasih.

Menurut Ibu Yeti, dulu honor atau gaji mereka diberikan oleh kabupaten. Mereka akan mengumpulkan absen dan gaji mereka akan dibayarkan, tetapi sekarang tidak ada lagi honor dari kabupaten. Ketidadaan uang untuk menggaji para pengajar membuat pendidikan di PAUD tidak berjalan dengan lancar.

PAUD Sinar Kasih sendiri mengalami masalah yang sama seperti SD Yosiba, yaitu guru yang tidak aktif untuk mengajar. Tak jarang, Ibu Yeti selaku Ketua PAUD Sinar Kasih harus jalan mengingatkan teman-temannya pada hari mengajar yang sudah ditentukan. Dulu pendidikan di PAUD Sinar Kasih bisa aktif dari hari Senin-Jumat, namun karena Corona hari belajar-mengajar di PAUD Sinar Kasih hanya hari senin, rabu dan jumat, namun karena persoalan gaji akhirnya aktifitas belajar mengajar hanya pada hari Rabu.

## 6. Sistem Pendidikan K13

Sementara itu, kurikulum K13 yang mengharuskan guru untuk mengajar dan mengenal kepribadian siswa. Ini membuat pentingnya penambahan guru di SD Yosiba. Selain mempermudah proses belajar mengajar, guru juga bisa memperhatikan psikis setiap anak.

*“Anak yang datang dengan rapi, dari rambut sampai pakaian, berarti ada perhatian khusus dari orang untuk anak. Begitu juga dengan belajarnya. Anak yang malas tulis, baca juga belum kenal huruf, kata juga dia mau sambung susah, berarti ini kekurangan perhatian dari orang tua juga. Kalau guru cukup. Untuk orang tuanya saja yang perhatiannya kurang. Kembali ke guru, kitong juga kurang untuk evaluasi dengan orangtua”, ungkap Ibu Mikha.*

Sudah sejak bulan Januari Ibu Milka bisa mengajar sampai tiga kelas, dari kelas satu sampai kelas tiga. Karena guru-guru yang mengajar di kelas satu dan kelas dua, jarang masuk. Sementara menurut Ibu Milka, anak-anak punya semangat belajar, tetapi guru yang kurang menjadi kendala bagi anak untuk bisa belajar. Semua ini ternyata berdampak pada kondisi anak-anak yang sulit beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mereka masih memanggil Ibu Milka dengan sebutan *mama tua* atau *tanta*.

Situasi ini yang membuat orangtua berpendapat bahwa guru-guru di SD Yosiba sangat malas untuk mengajar, sedangkan menurut Ibu Milka biasanya guru kelas dari beberapa kelas yang tidak hadir, tetapi yang dianggap tidak masuk justru semua guru.

### **Masalah Pendidikan di Kampung Wambena**

Masuknya pendidikan di Depapre sudah ada sejak tahun 1940-1950-an, namun pada tahun-tahun ini masyarakat Kampung Wambena menempuh pendidikan di Kampung Dormena karena belum ada sekolah di Wambena. Barulah sekitar tahun 1965-an, SD YPK Filial Wambena dibuka. Banyak orangtua yang kemudian bersekolah di SD YPK Filial, salah satunya adalah Bapak Konstan Yarisetouw yang lulus dari SD YPK Filial pada tahun 1972. Ia mengisahkan pengalamannya dulu

*"Dulu tidak ada bangunan sekolah, sekolah dengan gereja jadi satu jadi kita belajar di gereja"*<sup>10</sup>

Namun pada tahun 1975 SD YPK Filial ditutup untuk selamanya.

Setelah 14 tahun, pada tanggal 16 Juli 1989, sekolah dibuka lagi oleh seorang perintis, Bapak Matheus Yarisetouw yang juga adalah seorang guru yang sebelumnya mengajar di Kampung Dormena. Bapak Matheus kembali membuka sekolah atas izin dari Pengurus YPK di Argapura. Sekolah akhirnya berjalan meski dengan bangunan sederhana yang hanya beralaskan atap daun sagu. Bangunan tidak permanen yang terbagi menjadi empat ruangan ini menjadi tempat awal untuk anak-anak Wambena kembali belajar dari kelas 1 sampai kelas 6.

Dalam masa jabatan pertama Bupati Ir. Yan Pieter Karafir M.Sc ditahun 1990-an akhirnya ada bantuan pembangunan gedung sekolah yang diberikan. Sekolah yang dikenal sampai hari ini sebagai SD YPK Wambena telah memiliki 6 enam kelas dengan 1 ruangan multifungsi, yang digunakan sebagai perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah dan karena memiliki 1 kamar, akhirnya kamar tersebut ditempati oleh salah satu guru kontrak yang mengajar di SD YPK Wambena.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak KY, pada 05 Mei 2022

Selain SD, ada juga PAUD di Kampung Wambena, sebelumnya hanya Taman Posyandu dibawah binaan kader-kader Posyandu hingga akhirnya dihentikan dan PAUD dibuka. Selesai dari PAUD anak-anak akan lanjut masuk di SD. Sementara SMP berada di Kampung Dormena. Anak-anak Wambena akan berjalan kaki ke kampung sebelah untuk bersekolah, jika ada yang memiliki motor, mereka akan berboncengan saat pergi dan pulang dari sekolah.

Meski pendidikan telah masuk sejak lama, tetapi masalah pendidikan di Wambena begitu kompleks. Hal ini tentu mengganggu masyarakat yang sangat menginginkan pendidikan bisa berjalan lancar. Masalah-masalah yang tak kunjung selesai tercatat dalam perjalanan kami di Kampung ini.

### 1. Guru: Ketidakhadiran dan Upah Para Honorer

Masalah guru adalah masalah utama di Kampung Wambena. Di SD YPK Wambena ada tujuh guru, yang terdiri dari tiga ASN termasuk Kepala Sekolah, dua guru kontrak dan dua guru honor. Saat kami berkunjung ke SD, hanya dua guru yang sedang mengajar. Mereka adalah guru kontrak, Ibu Icha dan Ibu Elisabeth. Ibu Icha mengajar kelas empat, sedangkan ibu Elisabeth mengajar kelas tiga.

Jumlah siswa SD YPK Wambena ada 75. Dua siswa, Amanda Demetouw dan Yuliana Yarisetouw, siswa kelas lima yang kami temui mengatakan bahwa Wali Kelas mereka sedang tidak masuk.



Foto 9 Anak SD YPK Wambena  
Dok. SKPKC Fransiskan Papua

*"Biasa guru ada, biasa juga tidak ada. Kelas yang sering tidak ada guru itu kelas 1, kelas 2 dan kelas 4, ini kalau guru keluar"<sup>11</sup>*

Kurangnya tenaga pengajar di SD YPK Wambena telah menjadi rahasia umum di Kampung Wambena. Persoalan kekurangan tenaga pengajar telah diketahui juga oleh masyarakat dan aparat kampung. Masalah ini telah dikeluhkan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, tetapi sampai hari ini tidak ada perubahan terkait jumlah guru. Justru yang terjadi adalah pengurangan guru jika salah satu guru PNS pensiun.

Menurut Ibu Elisabeth, mereka kekurangan guru mata pelajaran tertentu, seperti agama dan olahraga. Tak jarang mereka juga harus merangkap sebagai guru agama dan guru olahraga. Hal ini juga dilakukan jika ada Wali Kelas yang tidak masuk, maka guru atau kepala sekolah akan menggantikan guru yang tidak

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Murid SD YPK Wambena, Y dan A, pada 09 Mei 2022

hadir. Namun tak jarang ketidakhadiran guru berakibat pada semangat belajar anak yang menurun. Menurut Bapak Konstan Yarisetouw, ketidakatifan guru di sekolah karena persoalan honor.

*"Honor mereka dibayarkan juga oleh kampung, tapi itu tidak seberapa. Itu juga membuat mereka tidak serius untuk mengajar karena jaminan tidak memadai, tidak sama dengan pengabdian mereka"*<sup>12</sup>

Konstan adalah Ketua Komite di SD YPK Wambena, ia telah 18 tahun menjadi Ketua Komite dan mengikuti permasalahan pendidikan di Kampung Wambena. Pada bulan maret 2022, masalah guru juga dilaporkan oleh Bapak Konstan ke Dinas. Bapak Konstan juga bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Jayapura untuk meminta penambahan guru PNS ke Kampung Wambena. Menurut Bapak Konstan, guru PNS sudah memiliki jaminan hidup, beda dengan guru honor yang bisa memilih mau rajin masuk atau tidak. Kekurangan guru ini juga dikeluhkan oleh salah satu guru kontrak yang mengajar di SD YPK Wambena.

*"Kalau PNS kan suka-suka saja mau masuk atau tidak, tapi kita ini dilihat dari kehadiran jadi"*<sup>13</sup>

Upah guru honor juga dibayarkan oleh kampung sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pembayaran honor ini dilakukan ketika setiap pencarian dana kampung, dimana dalam 1 tahun biasanya akan ada dua kali pencarian dana kampung, jadi dua kali guru honor menerima uang dari pemerintah Kampung. Sedangkan guru kontrak menerima upah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dibayar pertiga bulan. Ada juga uang kelas yang diterima sebesar Rp.200.000 – Rp.400.000 dan biasanya akan dibayar pertiga bulan.

Persoalan honor guru menjadi penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten karena honor mempengaruhi kinerja guru honor yang mengajar. Terlebih di SD YPK Wambena guru honor yang diberi tugas untuk mengajar kelas 1 dan kelas 2 dan ketika mereka tidak masuk, otomatis anak-anak kelas 1 dan kelas 2 tidak dapat belajar. Penekanan honor guru juga disampaikan oleh masyarakat pada Kepala Sekolah SD YPK Wambena untuk memperhatikan guru honor yang mengajar di SD YPK Wambena.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak KY, pada 05 Mei 2022

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Guru Honor SD YPK Wambena, pada 04 Mei 2022

## 2. Sarana Prasarana

### a. Gedung PAUD

Kampung Wambena memiliki 1 PAUD, namun PAUD Wambena belum terdaftar dalam DAPODIK. Kendala dengan fasilitas seperti laptop membuat kerja pendataan sulit dilakukan namun menurut salah satu pengajar PAUD tahun ini mereka akan mulai melakukan pendataan dan akan serahkan pada pemerintah Kabupaten. Sebelumnya anak-anak menerima pendidikan dari



Foto 10 Gedung Balai Kampung Wambena yang digunakan untuk Posyandu, PKK, PAUD  
Dok. SKPKC Fransiskan Papua

Taman Posyandu, hingga masuknya PAUD membuat Taman Posyandu dihentikan dan anak-anak akan belajar di PAUD.

Sayangnya, salah satu masalah PAUD di Wambena adalah PAUD, Posyandu dan PKK berada dalam satu bangunan dan hanya dipisahkan dengan ruangan-ruangan kecil. Kondisi bangunan juga sangat memprihatikan. Pintu yang tidak lagi terpasang, jendela yang pecah, Taman bermain yang besi-besinya telah karat dan rusak. Semua menambah mirisnya wajah bangunan yang memiliki banyak fungsi ini.

Sejauh ini belum ada rencana yang lebih jauh terkait pembangunan gedung PAUD

yang terpisah dari PKK dan Posyandu. Hanya rencana menambah memasukkan data yang telah disiapkan agar PAUD Wambena bisa terdaftar di Kementerian.

### b. Jaringan Internet

Saat semua hal terasa dimudahkan dengan kehadiran Internet, ternyata yang terjadi justru sebaliknya di Kampung Wambena. Kampung ini belum tersentuh dengan kehadiran Internet. Jaringan Internet untuk berkomunikasi hanya sampai di Kampung Tablasupa, tepatnya di SMK Negeri 3 Depapre. Memasuki kampung Yepase, kampung Wambena dan lainnya, jaringan Internet tidak tersedia. Ini adalah salah satu tantangan bagi para guru yang mengajar di Kampung karena mereka kesulitan untuk mengupdate data-data mereka atau data-data sekolah.

Saat pandemi mengharuskan guru-guru mengajar secara online, guru-guru di Kampung justru harus berjalan dari rumah ke rumah untuk mengingatkan pada siswanya untuk mengumpulkan tugas. Berbeda lagi dengan anak-anak Kampung yang telah memasuki perguruan tinggi, mereka harus mencari tempat yang memiliki jaringan Internet untuk mengajarkan tugas-tugas kampus.

Kebijakan untuk mengambil tugas pada hari-hari tertentu di sekolah bisa menjadi ide yang baik, namun tetap saja Internet menjadi hal yang penting untuk mempermudah akses belajar dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pendataan.

**c. Listrik**

Sudah lebih dari setahun cahaya pelita menjadi harapan untuk menerangi Kampung Wambena. Listrik di Kampung ini telah mati. Masyarakat sebelumnya menggunakan listrik PLTA, namun mesin yang berada di dekat pantai telah rusak. Sementara listrik dari PLN dari Kampung Yepase hanya melewati Kampung Wambena menuju Kampung Dormena. Ini terjadi karena dulunya masyarakat sendiri yang menolak listrik dari PLN dengan alasan biaya listrik dari PLTA lebih murah dibanding PLN akhirnya mereka menolak PLN.

Masalah listrik telah diajukan oleh pemerintah kampung pada PLN sekitar bulan Maret dan dari pihak PLN telah berjanji akan memasang listrik, namun sampai saat ini listrik belum kunjung ada di Kampung Wambena. Tak jarang, anak-anak harus belajar dalam kegelapan dengan hanya mengandalkan pelita.

Bagi mereka yang datang dari Kota Besar, kondisi ini tidak akan mungkin bisa diterima dengan senang hati karena kebutuhan listrik dan Internet yang tidak bisa diterima akan berdampak pada aktivitas pekerjaan mereka. Namun masyarakat Wambena bisa menerimanya dengan berharap perubahan akan terjadi pada Kampung mereka.

**d. Bantuan Pendidikan**

Mayoritas penduduk di Kampung Wambena adalah petani. Biaya pendidikan yang mahal membuat mereka harus berputar otak untuk mencari uang membiayai kebutuhan anaknya. Hal ini dirasakan sekali oleh Bapak Konstan dan Mama Yakoba. Mereka memiliki enam orang anak yang disekolahkan di kampung sampai akhirnya kuliah di Kota Jayapura. Anak-anaknya empat orang telah kuliah, yang satu tidak menyelesaikan kuliahnya, tetapi tiga lainnya telah selesai dan telah mendapatkan pekerjaan. Masih ada dua anaknya yang bersekolah di Kota Jayapura. Kendala yang harus dihadapi mereka adalah biaya anak, terlebih uang semester yang tidak murah. Mereka akhirnya menjadi pedagang buah. Biasanya mereka akan membeli buah di Sentani dan menjualnya kembali didepan Mega Abepura. Untungnya anak-anak Bapa Konstan dan Mama Yakoba bisa mendapatkan beasiswa.

Pembagian beasiswa di Kampung Wambena tidak merata. Ada anak-anak yang tidak menerima beasiswa dari kampung. Dari dana kampung sekitar Rp. 80.000.000 disiapkan untuk beasiswa anak-anak di Kampung Wambena disetiap jenjang, dari SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Beberapa warga mengeluhkan jumlah nominal beasiswa yang menurut mereka

menurun selama tahun 2020-202, dimana bagi SD yang sebelumnya menerima Rp. 500.000 turun menjadi Rp.250.000, ada juga yang mengatakan Rp.200.000, SMP tadinya Rp. 500.000 menjadi Rp.300.000, SMA seharusnya menerima Rp. 700.000 menjadi Rp.500.000 dan untuk anak-anak yang kuliah jumlahnya sebesar Rp.3.000.000 dan berkurang menjadi Rp. 1.000.000

Keluhan masyarakat ditampung berbeda. Ada yang hanya mengeluhkan jumlah beasiswa yang menurun, ada juga yang mencurigai pemerintah Kampung karena menurut mereka laporan yang dibuat pemerintah Kampung jumlahnya lebih, tetapi yang diterima anak-anak sekolah di Kampung sedikit. Selain beasiswa dari kampung, di SD YPK Wambena juga ada beasiswa yang diberikan pada siswa. Saat kami menanyakan jumlah yang diterima, guru tersebut tidak mengetahui jumlah beasiswa yang diterima oleh siswa *“150 atau 300, saya juga kurang tahu, semua kepala sekolah yang tahu,”* ujarnya. Di SD YPK Wambena urusan uang diatur oleh Kepala Sekolah, maka tidak heran guru yang kami temui tidak mengetahui jumlah nominal beasiswa, yang Asal dananya datang dari Kementerian Pendidikan.

Beasiswa di Kampung Wamben tidak diberikan secara merata. Ada anak-anak yang tidak mendapatkan beasiswa baik dari kampung maupun dari sekolah sekalipun orangtua adalah petani atau buruh bangunan. Untuk beasiswa sekolah biasanya diberikan pada anak-anak yang memiliki nama, dimana ini ditentukan langsung dari Pusat jadi sudah pasti ada anak-anak yang tidak akan mendapatkan, sekalipun secara ekonomi mereka membutuhkan beasiswa.

Bantuan Pendidikan biasanya akan menjadi kebijakan pemerintah Kampung terpilih, ada atau tidaknya beasiswa ditentukan oleh siapa yang akan menjadi Kepala Kampung dan ini terjadi hampir disemua kampung. Tahun ini akan ada pemilihan pengurus kampung yang baru, tentu saja perubahan akan terjadi entah lebih baik atau kurang baik.

**e. Transportasi, Akses Jalan**

Persoalan jalan Sentani-Depapre yang rusak dan hancur nampaknya sudah menjadi hal yang biasa bagi semua orang di Kabupaten Jayapura, tetapi berbeda jika membahas tentang transportasi. Di Kampung Wambena transportasi menuju kota hanya akan ada ketika hari pasar, yaitu hari selasa, kamis dan sabtu. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi guru SD YPK Wambena di Kampung yang harus pergi ke Kota karena transportasi tidak selalu ada di Kampung. Ini menjadi salah satu kendala guru kontrak yang bekerja di Kampung Wambena.

Kenyataan yang sama juga harus dihadapi oleh anak-anak sekolah. Biasanya jika yang melanjutkan SMP di SMP Satu Atas Dormena mereka masih bisa berjalan kaki, namun jika mereka bersekolah di SMK N 3 di

Tablasupa mereka harus memiliki motor karena jarak dari Kampung Wambena menuju SMK N 3 di Tablasupa sangat jauh.

Selain di Sekitar Distrik Depapre, anak-anak Kampung Wambena juga banyak yang bersekolah di SMP N 3 Dosay dan SMA N 2 Maribu, yang keduanya berada di Distrik Sentani Barat dan membutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan. Kendala mereka dengan hari pasar membuat mereka akhirnya tidak bisa bersekolah jika di luar hari pasar, kecuali jika ada teman yang memiliki motor, mereka akan saling berboncengan menuju sekolah. Kondisi yang memprihatikan, tetapi kenyataannya seperti itu perjuangan anak-anak Kampung Wambena untuk tetap bersekolah.



Foto 11 Ruas Jalan Depapre ke Kampung Wambena  
Dok. SKPKC Fransiskan Papua